

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan suatu usaha mensejahterakan yang dilakukan oleh, individu, kelompok dan institusi untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program dan usaha misalnya bantuan sosial, pemberdayaan dan pelayanan sosial, karena setiap individu berhak mendapatkan kesejahteraan yang layak.

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar dan dapat menjalankan kehidupannya dengan baik. Tidak semua orang dapat mensejahterakan hidupnya sendiri, ada sebagian orang yang kurang beruntung misalnya seseorang tidak mempunyai relasi untuk menggali dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki orang tersebut, maka orang akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. menurut Friedlander dalam Fahrudin (9:2014) yaitu:

Social welfare is the organized system of social service and institutions, design to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationships that permit the to develop their full capaties and to promote their well being in harmony with needs of their families and the community

Definisi di atas menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisir bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

miskin untuk meningkatkan standar kehidupannya agar lebih layak, program tersebut dapat berupa bantuan materi, non materi dan jaminan pelayanan kesehatan atau memberikan relasi sosial yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan sumber yang dimilikinya. Di Indonesia kesejahteraan warga negaranya telah diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2009 yaitu: “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Kesejahteraan sosial sebagai akademik merujuk kepada ilmu kesejahteraan sosial yang mana ilmu tersebut harus dapat dikembangkan terus guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga mensejahterakan masyarakat. Kesejahteraan sosial menurut disiplin akademik menurut Adi (2015-23) adalah :

Ilmu kesejahteraan sosial adalah suatu ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup (kondisi) masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah sosial: pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat; dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat yang berkembang.

Definisi di atas bahwa ilmu kesejahteraan sosial merupakan ilmu yang harus diaplikasikan dan dikembangkan pemikiran, metode sehingga dapat bermanfaat untuk mencapai kondisi yang sejahtera. Kesejahteraan sosial sebagai disiplin ilmu akademik menurut Zastrow yang dikutip oleh Fahrudin (2014 : 31) menjelaskan bahwa :

Another meaning of social welfare derives from its role as an academic discipline. In this context, social welfare is “the study of agencies, programs, personnel, and policies which focus on the delivery of social services to individuals, groups, and communities.

Pernyataan undang undang tersebut sejalan dengan friedlander mengemukakan bahwa sejahtera merupakan kondisi tercukupinya baik sandang, pangan dan papan. Namun, adapun kebutuhan biologis yang harus dipenuhi misalnya rasa aman, nyaman dan kasih sayang dari orang lain dan dapat berperan di lingkungan sosialnya. Menurut Fahrudin (10:2014) kesejahteraan sosial mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mencapai kehidupan sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Tujuan kesejahteraan di atas diharapkan dapat tercapai agar seseorang dapat mengembangkan potensi diri dan mandiri dalam memecahkan masalah yang dialami oleh dia dengan demikian dia dapat bertahan dalam kelangsungan menjalankan perannya di masyarakat. Selain itu adapun Fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan oleh terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negati akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

a. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

b. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidak mampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

c. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

d. Fungsi Penunjang (*Support*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan sosial kesejahteraan sosial yang lain.

2.1.2 Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial dapat dilakukan oleh relawan sosial ataupun oleh lembaga sosial dengan adanya pelayanan sosial ini diharapkan dapat mengurangi dan dapat mengendalikan suatu permasalahan sosial yang ada. Biasanya pelayanan sosial yang

diberikan oleh lembaga atau institusi lebih bersifat profesional dan dilakukan oleh tenaga ahli yang berkompeten. Pelayanan sosial menurut Huraerah (45:2011) yaitu:

Kegiatan terorganisir yang ditujukan untuk membantu warga negara yang mengalami permasalahan sebagai akibat ketidakmampuan keluarga melaksanakan fungsi-fungsinya, kegiatan ini antara lain berupa pelayanan sosial bagi anak (termasuk balita dan remaja) serta usia lanjut terlantar atau mengalami bentuk kecacatan.

Dari definisi di atas menjelaskan bahwa pelayanan sosial ditujukan untuk semua golongan masyarakat miskin, anak terlantar, remaja, lansia dan disabilitas agar dapat membantu mereka dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya melalui program yang diberikan oleh lembaga tertentu untuk mengembalikan keberfungsian sosial mereka agar berjalan kembali dengan baik. Adapun fungsi pelayanan sosial menurut Fahrudin (54:2012) yaitu:

(1) pelayanan-pelayanan untuk sosialisasi dan pengembangan, (2) pelayanan pelayanan untuk terapi, pertolongan dan rehabilitasi, termasuk perlindungan sosial dan perawatan pengganti, (3) pelayanan-pelayanan untuk mendapatkan akses informasi dan nasihat.

Fungsi di atas jelas sekali bahwa pelayanan sosial dibentuk untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan memberikan sosialisasi, informasi dan perlindungan sosial agar keberfungsian sosial seseorang tersebut dapat berjalan kembali di masyarakatnya.

2.1.3 Pekerjaan sosial

Pekerja sosial merupakan pekerjaan profesional yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi masalah sosialnya sendiri. Selain itu pekerja sosial juga bertujuan memperbaiki keberfungsian sosial

individu yang tidak berjalan, melalui metode dan teknik pekerja sosial yang dapat di praktikan. Menurut Iskandar (3:2013) yaitu:

Praktek pekerja sosial adalah seni. Pengetahuan yang mendukungnya berasal dari ilmu-ilmu pengetahuan sosial. Pengobatan dan prikeatri dan jika praktisi menggunakan pengetahuannya untuk memberikan pertolongan kepada orang yang bermasalah, maka ia harus mempraktekkannya sebagai suatu seni. Praktek pekerja sosial yang baik adalah yang kreatif. Pekerja sosial terbaik akan menggunakan kepribadiannya sendiri dalam membantu kelayan, yaitu dapat memainkan instuisinya, imajinasi dan perasaannya. Sebagaimana mereka menguasai pengetahuan dan keterampilan tehnis dengan baik.

Definisi di atas menjelaskan bahwa pekerja sosial merupakan suatu pekerjaan yang dianggap seni yang berasal dari ilmu sosial untuk mengembalikan keberfungsian sosial para klien. Dalam penyelesaian suatu permasalahan klien pekerja sosial harus kreatif dan bervariasi dalam memberikan solusi dan melakukan intervensi. Karena pada padasarnya permasalahan seseorang itu berbeda beda dan penyelesaiannya pun tentunya akan berbeda. Hal ini sejalan dengan pernyataan Zastrow dalam Suharto (1:2009) yaitu:.

Sebagai suatu aktivitas profesional, pekerja sosial didasari oleh kerangka pengetahuan (body of knowledge), kerangka keahlian (body of skills) dan kerangka nilai (body of values) yang secara integratif membentuk profil dan pendekatan pekerjaan sosial.

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa Pekerja sosial yang baik dan profesional harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas seperti ilmu, sosiologi, antropologi, filsafat, ekonomi, politik dan sebagainya. Kemudian harus memiliki keahlian-keahlian yang harus dimiliki misalnya, ahli berkomunikasi, membangun relasi dan ahli dalam bersosialisasi dengan klien dan masyarakat. Selain itu seorang

pekerja sosial harus menjunjung tinggi nilai dan norma sosial yang ada dimasyarakat.

Siporin dalam Fahrudin (61:2014) yaitu: “*Social work is defined as a social instutional, methods of helping people to prevent and to resolve their problems, to restore and enhance their social functioning*” definisi diatas memaparkan bahwa pekerja sosial menangani suatu permasalahan sosial menggunakan metode metode yang dapat digunakan seperti *casework, grupwork, community oraganization and community development (CO&CD)*, dengan adanya pekerja sosial ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memperbaiki keberfungsian sosial yang tidak berjalan. Definisi pekerjaan sosial menurut Internasional Federation Social Workers (IFSW, 2000) yang dikutip oleh Soelaiman dalam Suharto (2011: 16) bahwa:

Pekerjaan sosial adalah suatu profesi yang berkomitmen untuk menegakkan keadilan sosial untuk mewujudkan kualitas hidup dan pengembangan penuh potensi individu, kelompok, dan komunitas. Berupaya mengatasi isu sosial pada setiap lapisan sosial dan ekonomi masyarakat terutama sekali orang-orang miskin dan sakit. Pekerja sosial berurusan dengan permasalahan sosial, penyebab dan pemecahannya serta dampak kemanusiaannya. Mereka bekerja dengan individu, kelompok, organisasi dan komunitas.

Definisi di atas menjelaskan bahwa pekerja sosial merupakan profesi yang diharapkan dapat menegakkan keadilan sosial dan mengembangkan potensi seseorang bertujuan untuk meningkatkan kualitas orang yaitu orang miskin dan orang sakit yang membutuhkan bantuan. Dengan mengembangkan potensi diri diharapkan orang tersebut dapat berdaya dan berperan di masyarakat sesuai dengan peran atau potensi yang dimilikinya. Menurut Hepworth, Rooney, dan Larsen dalam Fahrudin (65:2014) seorang pekerja sosial memiliki unsur-unsur yang harus dimiliki dalam

menjalankan prakteknya yaitu: “(1). Maksud/ tujuan profesi itu, (2) nilai nilai dan etika, (3) dasar pengetahuan praktik langsung, (4)metode- metode dan proses-proses yang dilakukan“. Dengan demikian seorang pekerja sosial tentunya akan dibekali dnegan pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan, nilai-nilai yang berlaku dan metode yang dapat di praktekkan langsung terhadap klien pekerja sosial tersebut.

Tujuan utama profesi pekerjaan sosial adalah untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas hidup seseorang dan membantu untu memenuhi kebutuhan dasar melalui pengembangan potensi diri dalam memecahkan masalah dan memberdayakan dengan memanfaatkan sumber yang tersedia. Tujuan praktik pekerjaan sosial menurut NASW dalam Zastrow yang dikutip oleh Fahrudin (2012: 66), yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (*coping*), perkembangan.
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan.
3. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.

Pernyataan di atas menejelaskan bahwa pekerja sosial bertujuan untuk mengembangkan potensi diri, menyalurkan dan membangun relasi sosial yang baik

dengan individu lain, meningkatkan kinerja dalam memanfaatkan sumber sumber dan memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat miskin. Adapun bidang garapan pekerja sosial menurut Suharto (6:2009) yaitu :

1. Keluarga dan pelayanan anak: pengutan keluarga, konseling keluarga, pemeliharaan anak dan adopsi, perawatan harian, pencegahan penelantaran dan kekerasan rumahtangga.
2. Kesehatan dan rehabilitasi: pendampingan pasien di rumah sakit, pengembangan kesehatan masyarakat , kesehatan mental, rehabilitasi vokasional, rehabilitasi pecandu obat dan alkohol, pendampingan ODHA, harm recuction programmes.
3. Pengembangan masyarakat perencanaan sosial, pengorganisasian masyarakat, revitalisasi keteanggaan, perawatan lingkungan hidup, kehutanan sosial, penguatan modal sosial, penguatan ekonomi kecil.
4. Jaminan sosial: skema asuransi sosial, bantuan sosial, social fund, jaring pengamanan sosial dan jaminan kesehatan masyarakatn.
5. Pelayanan kedaruratan: pengorganisasian bantuan, manajemen krisis informasi dan rujukan, integrasi pengungsi, pengembangan peringatan dini masyarakat.
6. Pekerjaan sosial sekolah: konseling penyesuaian sekolah, manajemen perilaku belajar manajemen tunjangan biaya pendidikan, pengorganisasian makan siang murid, peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam pendidikan.

2.2 Pengertian Keberfungsian Sosial

Salah satu tujuan dari profesi pekerja sosial merupakan mengembalikan keberfungsian sosial. Seseorang dapat berfungsi apabila dapat melakukan peran dimasyarakat, dapat berelasi dan berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat sekitarnya. Barlet dalam Fahrudin (62:2014) menyatakan bahwa “Keberfungsian sosial adalah mengatasi (couping), tuntutan (demands) lingkungan yang merupakan tugas-tugas kehidupan”. Artinya seseorang berjalan keberfungsian sosialnya yaitu orang yang dapat mengatasi permasalahan sosialnya dan menyelesaikan tuntutan pekerjaan sesuai dengan peran sosialnya.

Seseorang dikatakan tidak berfungsi sosial apabila dapat melakukan peran yang ia dapatkan dilingkungannya dan mengatasi tuntutan pekerjaan di masyarakat, peran disini merujuk pada tugas yang dia harus kerjakan dan selesaikan sesuai bidang kehidupannya. Keberfungsian sosial adalah salah satu fokus tujuan keberhasilan dalam praktik pekerjaan sosial. Menurut max siporin dalam Huraerah (40:2008) yaitu:

1. Mengembangkan, mempertahankan, dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.
2. Menjamin standar penghidupan, kesehatan, dan kesejahteraan yang memadai bagi semua. Ini melibatkan tugas-tugas instrumental sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan sumber-sumber manusia untuk memenuhi kebutuhan perkembangan dasar dari individu dan keluarga.

- b. Membagikan dan menyamakan alokasi sumber-sumber sosial dan ekonomi yang dibutuhkan.
 - c. Mencegah kemelaratan dan mengurangi kemiskinan, kesukaran sosial, dan kepapaan.
 - d. Melindungi individu-individu dan keluarga dari bahaya kehidupan, dan memberi kompensasi atas kehilangan karena bencana, ketidakmampuan, kecacatan, dan kematian.
3. Memungkinkan orang berfungsi secara optimal dalam peranan dan status kelembagaan mereka.
- a. Mengaktualisasi potensi-potensi untuk produktivitas dan realisasi diri, di pihak orang maupun lingkungan sosialnya, untuk bentuk-bentuk kreatif dan altruistik dari keberfungsian sosial dan kehidupan bersama.
 - b. Membantu orang mendapatkan kembali atau mencapai tingkat yang lebih tinggi dari keberfungsian yang memuaskan dan normatif sebagai anggota masyarakat, melalui perbaikan kemampuan dan keterampilan mereka yang tidak berkembang atau rusak, melalui penggunaan secara optimal sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan dari kelompok dan lembaga sosial mereka, dan melalui penyelesaian kesukaran-kesukaran mereka dalam sosial dan kehidupan sosial.
 - c. Menyediakan pengganti bagi keluarga dan masyarakat dalam memberikan jenis-jenis bantuan pendukung, pengganti, perlindungan dan pencegahan kepada individu dan keluarga.

- d. Mengintegrasikan orang satu sama lain, menghubungkan di antara mereka dan menyesuaikan individu dengan lingkungan sosial mereka khususnya dengan sistem sumber kesejahteraan sosial mereka.
4. Mendukung dan memperbaiki tatanan sosial dan struktur kelembagaan masyarakat.
 - a. Membantu institusi-institusi sosial seperti keluarga, hukum, perawatan, kesehatan, dan ekonomi dalam mengembangkan dan mengoperasikan struktur dan program pelayanan efektif untuk memenuhi kebutuhan manusia dan untuk melindungi kepentingan anggotanya.
 - b. Melaksanakan tindakan-tindakan penyesuaian dan perubahan sosial dan tindakan-rindakan stabilitas dan pengawasan sosial yang efektif, yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial.

2.3 Pengertian Masalah Sosial

Masalah sosial merupakan suatu fenomena yang muncul dimasyarakat yang merupakan hasil dari ketimpangan yang ada di masyarakat, ketimpangan tersebut bisa disebabkan karena faktor ekonomi, kemiskinan pengangguran dan sebagainya Masalah sosial menurut Weinberg yang dikutip Soetomo (2010:7) bahwa masalah sosial adalah:

Situasi yang dinyatakan sebagai suatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup signifikan, dimana mereka sepakat dibutuhkannya suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut. Dimana dari definisi tersebut memiliki tiga unsur penting yaitu: (1) Suatu situasi yang dinyatakan (2) Warga masyarakat yang signifikan (3) Kebutuhan akan tindakan pemecahan masalah.

Definisi diatas dapat menjelaskan bahwa suatu keadaan dimana terdapat ketimpangan nilai nilai yang ada dimasyarakat mengakibatkan terjadinya dinamika sosial dan penyesuaian kembali dan adanya upaya pemecahan masalah dari hasil dinamika sosial tersebut. Weinberg melihat bahwa maslaah sosial sebagai hasil dari pemaksaan masyarakat. Sedangkan menurut Kartono yang dikutip Huraerah (2011:4) berpandangan bahwa yang disebut masalah sosial yaitu:

- a. Semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memerkosa adat-istiadat masyarakat (dan adat-istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama).
- b. Situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat sebagai gangguan, tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan orang banyak.

Definisi di atas menjelaskan bahwa semua tindakan dan perilaku yang melanggar nilai-nilai moral maupun hukum yang ada di masyarakat yang mengakibatkan masalah dalam kehidupan sosial sehingga dapat merugikan orang banyak baik berupa materi maupun non-materi.

Pekerjaan sosial menjalankan peranan-peranan tertentu ketika melakukan praktik pekerjaan sosial baik pada level individu, keluarga, kelompok, komunitas dan masyarakat. Beberapa peranan pekerja sosial menurut Zastrow yang dikutip Huraerah (2008: 149) yaitu: “*Enabler, Broker, Expert, Social Planner, Advocate, dan The Activist*”. *Enabler* merupakan peranan pekerja sosial yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, komunitas atau masyarakat agar dapat.

mengungkapkan kebutuhan mereka, menjelaskan dan mengidentifikasi masalah tersebut, dan mengembangkan kemampuan agar dapat menangani masalah yang dialaminya. *Broken* merupakan peranan pekerja sosial yang bertujuan untuk

menghubungkan individu, kelompok, komunitas atau masyarakat ke system sumber yang ada di lingkungannya. *Expert* merupakan peranan pekerja sosial yang menyediakan informasi dan memberikan saran-saran yang dapat membangun upaya untuk mencapai kondisi sejahtera. *Social planner* merupakan peranan pekerja sosial yang merujuk pada pengumpulan fakta-fakta tentang masalah sosial yang terjadi, menganalisa fakta tersebut, dan menyusun strategi alternative dalam pemecahan masalah tersebut. *Advocate* merupakan peranan pekerja sosial melakukan advokasi, yaitu mewakili dari kelompok yang membutuhkan pertolongan ataupun pelayanan. Tetapi instansi yang seharusnya memberikan pertolongan ataupun pelayanan tidak dilakukan bahkan menolak. *The activist* merupakan peranan pekerja sosial untuk melakukan tindakan melawan aparaturnya pemerintah yang ada. Pekerja sosial mendorong kelompok yang tertekan atau kelompok yang tertindas untuk melawannya.

2.3.1 Karakteristik Masalah Sosial

Masalah sosial muncul karena adanya kekurangan dalam diri manusia yang bersumber dari faktor ekonomi, biologis, biopsikologis serta kebudayaan. Faktor ekonomis yang salah satunya adalah kemiskinan. Dalam Huraerah (2011:83) masalah sosial memiliki 4 karakteristik, yaitu:

1. Kondisi yang dirasakan banyak orang. Suatu masalah baru dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila kondisinya dirasakan oleh banyak orang. Namun demikian, tidak ada batasan mengenai berapa jumlah orang yang

harus merasakan masalah tersebut. Jika suatu masalah mendapat perhatian dan menjadi pembicaraan lebih dari satu orang, masalah tersebut adalah masalah sosial.

2. Kondisi dinilai tidak menyenangkan. Menurut paham hedonisme, orang yang cenderung mengulang sesuatu yang menyenangkan dan menghindari masalah, karena masalah selalu tidak menyenangkan. Penilaian masyarakat sangat penting dalam menentukan suatu kondisi sebagai masalah sosial. Suatu kondisi dapat dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat tertentu tetapi tidak oleh masyarakat lainnya.
3. Kondisi yang menuntut pemecahan. Suatu yang tidak menyenangkan senantiasa menuntut pemecahan. Bila seseorang merasa lapar, akan segera dicarinya rumah makan. Bila sakit kepala, ia akan segera pergi ke dokter atau membeli obat. Umumnya, suatu kondisi dianggap perlu dipecahkan jika masyarakat merasa bahwa kondisi tersebut memang dapat dipecahkan. Pada waktu lalu, masalah kemiskinan tidak dikategorikan sebagai masalah sosial, karena waktu itu masyarakat menganggap kemiskinan sebagai sesuatu yang alamiah dan masyarakat belum memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Sekarang, setelah masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menanggulangi kemiskinan, kemiskinan ramai dibicarakan dan diseminarkan, karena dianggap sebagai masalah sosial.
4. Pemecahan tersebut harus dilakukan melalui aksi sosial secara kolektif, masalah sosial berbeda dengan masalah individual. Masalah individual dapat

diatasi secara individual, tetapi masalah sosial hanya dapat diatasi melalui rekayasa sosial seperti aksi sosial, kebijakan sosial atau perencanaan sosial, karena penyebab dan akibatnya bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang.

2.3.2 Komponen Masalah Sosial

Komponen masalah sosial biasanya dialami dengan jangka waktu tertentu, adanya kerugian materi maupun non materi yang dirasakan masyarakat dan ada penyelesaian yang unik yang dilakukan oleh masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Parillo yang dikutip Huraerah (2011:5) menyatakan, ada empat komponen, yaitu:

- a. Masalah itu bertahan untuk suatu periode tertentu.
- b. Dirasakan dapat menyebabkan kerugian fisik atau mental, baik pada individu maupun masyarakat.
- c. Merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial dari satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat.
- d. Menimbulkan kebutuhan akan pemecahan.

2.4 Pengertian Bantuan Sosial

Pemerintah telah berusaha meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin melalui bantuan sosial, dengan adanya bantuan sosial ini diharapkan beban masyarakat miskin dapat berkurang. Namun tidak hanya peran pemerintah saja yang menangani masalah ini, masyarakat pun harus ikut terlibat dalam penyaluran bantuan

sosial sosial ini agar bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran. Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* yang dikutip Supriyanto (10:2014) bantuan sosial yaitu :

Bantuan sosial sebagai bantuan yang ditargetkan kepada rumah tangga yang termasuk kedalam segmen terbawah dari distribusi pendapatan dan disediakan untuk mencegah terjadinya kesulitan ekstrem diantara penduduk yang tidak memiliki sumber daya, mengurangi eksklusi sosial, meminimalkan disinsentif untuk tenaga kerja dan meningkatkan kecukupan bagi rakyat miskin.

Dari definisi di atas menjelaskan bahwa bantuan sosial di fokuskan untuk keluarga yang pendapatannya minim yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan dengan bantuan sosial dapat mencegah ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang disebabkan kurangnya sumber pendapatan bagi mereka sendiri dan bantuan sosial ini diharapkan mengurangi beban dari orang miskin tersebut. Menurut Rahayu Lestari (2:2012) Ada beberapa program bantuan sosial yang diselenggarakan di Indonesia yaitu:

1. Bidang pendidikan meliputi Program BOS dan Beasiswa Pendidikan Siswa/ Mahasiswa Miskin
2. Bidang Kesehatan meliputi Program Jamkesmas di Puskesmas dan Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kelas III
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Perdesaan mencakup Kecamatan PPK, P2KP, PNPM Perkotaan, PNPM Infrastruktur Perdesaan/ PPIP, PNPM Daerah Tertinggal/ PDT, PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah.
4. Bidang Perlindungan Sosial, Meliputi Program Keluarga Harapan/PKH dan Bantuan Langsung Tunai/BLT.

Program yang diadakan BAZNAS adalah untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu agar lebih sejahtera hidupnya dengan diberikan bantuan sosial, dan BAZNAS adalah amil zakat yang memfokuskan diri membantu masyarakat kurang mampu tanpa mengharapkan timbal balik. Menurut Salamon & Anheier (2012:2) dalam buku McCandless Balunch bantuan sosial yaitu :

For the purpose of this book, the term nonprofi t sector is understood to encompass organizations that meet the characteristics of the structural-operational defi nition because this defi nition fi ts the various types of organizations accorded with the nonprofi t status and is best suited for comparing a broad range of NPOs.

Bantuan BAZNAS diberikan kepada para penerima manfaat dengan cara memberikan biaya bantuan kepada mereka yang membutuhkan untuk nantinya dibelikan barang sesuai kebutuhan mereka, Lembaga BAZNAS membantu dengan sukarela tanpa mengharapkan timbal balik dari para penerima manfaat yang diberikan bantuan oleh BAZNAS Kota Bandung.

2.4.1 Syarat Penerima Bantuan

Syarat penerima bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah yang diatur dalam pasal 24 permendagri nomor 32 tahun 2011 yang di kutip oleh Lapanda (24:2015) bahwa pemberian bantuan sosial harus memenuhi kriteria paling sedikit:

1. kriteria selektif, yang diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial
2. kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan

3. kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus yang diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus di berikan setiap tahun anggaran.: serta kriteria kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan lepas dari resiko sosial
4. sesuai tujuan penggunaan, yang diartikan meliputi
 - a. rehabilitasi sosial
 - b. perlindungan sosial
 - c. pemberdayaan sosial
 - d. jaminan sosial
 - e. penanggulangan kemiskinan dan
 - f. penanggulangan bencana.

Menurut peraturan menteri dalam negeri pasal 25 nomor 32 tahun 2011 telah memberi batasan atas tujuan bantuan sosial sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 6 sebagai berikut:

1. Rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar
2. Perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari keguncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat, agar keberlangsungan hidupnya dapat memenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

3. Pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
4. Jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

2.5 Pengertian Partisipasi

Kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat ini, berarti pula merupakan proses pembalikan paradigma yang selama ini digunakan, dari berorientasi pada ukuran-ukuran ekonomi ke ukuran-ukuran yang lebih menekankan pada aspek kemanusiaanya sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Karena apabila kita hanya membangun dari segi ekonominya saja akan berdampak pada kurang mandiri manusia yang ada. Menurut FAO dalam Mikkelsen yang dikutip Nugroho Dkk (113: 2005) bahwa “Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang berkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu”. Dari definisi diatas menjelaskan bahwa partisipasi merupakan suatu tindakan aktif individu atau kelompok dalam melakukan suatu kegiatan tertentu. Partisipasi ini biasanya dilakukan secara sukarela yang berbentuk, ide, gagasan, materi, tindakan dan lainlain.

Menurut Adisasmita (34:2006) mengungkapkan partisipasi adalah “ keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) Program/ Proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal”. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa

partisipasi adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan program dari pemerintah atau suatu organisasi dan lembaga sosial. Yang bertujuan untuk mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat agar kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien.

2.5.1 Bentuk Partisipasi dan Tingkatan Partisipasi

Pemaparan sebelumnya, secara sederhana partisipasi dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan sukarela yang dilakukan oleh individu dan kelompok yang ada dimasyarakat agar kegiatan atau program tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Adapun bentuk-bentuk partisipasi yang dapat diberikan, menurut Hamijoyo dan Iskandar yang dikutip Huraerah (102: 2008) yaitu:

- a. Partisipasi buah pikiran: yang diberikan partisipan dalam bentuk anjang sono, pertemuan atau rapat.
- b. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya.
- c. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya.
- d. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha industry.
- e. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanga keguyuban, misalnya turut arisan, koperasi, layad(dalam peristiwa kematian), dan kondangan (dalam pernikahan)

Bentuk-bentuk partisipasi menurut Sulaiman dalam Huraerah (103:2008) yaitu:

- a. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka
- b. Partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan masyarakat, dana dan sarana sebaiknya datang dari dalam diri masyarakat sendiri.
- c. Partisipasi dalam bentuk dukungan
- d. Partisipasi dalam bentuk pengambilan keputusan
- e. Partisipasi representatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Menurut Dusseldorp dalam Theresia Dkk (200:2015) mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

- a. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat
- b. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok
- c. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain.
- d. Menggerakkan sumber daya masyarakat
- e. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
- f. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapat dari kegiatan masyarakat.

Dilihat dari tingkatan atau tahapan partisipasi yang dikemukakan oleh Wilcox dikutip oleh Theresia (202:2015) yaitu ada 5 tingkatan diantaranya:

1. Memberikan Informasi (*Information*)
2. Konsultasi (*Consultation*) yaitu: menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik, tetapi tidak terlambat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.
3. Pengambilan keputusan bersama (*Deciding together*), dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta, mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan
4. Bertindak bersama (*Acting together*) dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan , tapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya.
5. Memberikan dukungan (*Support Independent community interest*) dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan

Menurut Hoofsteede yang dikutip oleh Huraerah (101:2008) membagi partisipasi menjadi tiga tingkatan yaitu:

1. Partisipasi inisiasi: (*iniasion participation*) partisipasi yang mengandung inisiatif dari pemimpin desa, baik formal maupun informal, ataupun dari anggota masyarakat mengenal suatu proyek, yang nantinya proyek tersebut merupakan kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat.
2. Partisipasi Legitimasi (*Legitimation participation*) adalah partisipasi pada tingkat pembicaraan atas pembuatan keputusan tentang proyek tersebut

3. Partisipasi eksekusi (*execution participation*) adalah partisipasi pada tingkat pelaksanaan

2.6 Tinjauan Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)

Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLHU) yang digagas oleh Lembaga BAZNAS Kota Bandung yang peduli akan banyaknya rumah yang tidak layak huni untuk para masyarakat menengah kebawah di Kota Bandung.

2.6.1 Sejarah Program Rutilahu

Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLHU) merupakan program dari Lembaga BAZNAS sebagai badan peyalur amil zakat nasional yang membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Program ini adalah salah satu dari banyak program yang diadakan oleh lembaga BAZNAS, program ini lahir dari banyaknya masyarakat kurang mampu yang memiliki tempat tinggal yang tidak layak di Kota Bandung.

Dede sebagai eksekutor bantuan RTLHU menyebutkan “banyaknya masyarakat Kota Bandung yang memiliki hunian yang tidak layak maka program ini dibuat, maka dari itu banyak sekali yang harus dibantu”

Program RTLHU ini dikelola oleh lembaga BAZNAS yang ada dibawah naungan pemerintah dan yang menjembatani para donator untuk memberikan bantuan terhadap para penerima manfaat yang membutuhkan untuk mendapatkan bantuan tempat tinggal yang layak huni.

Program RTLHU merupakan kegiatan bantuan sosial kemanusiaan yang membantu para masyarakat menengah kebawah untuk dapat merenovasi rumah dari

keadaan tidak layak sampai mempunyai rumah yang layak huni dan ini adalah salah satu kepedulian sesama untuk mensejahterakan mereka yang membutuhkan.

Meiky yang bertugas sebagai Humas & IT BAZNAS Kota Bandung sangat berbahagia diadakannya program RTLHU untuk masyarakat yang kurang mampu “saya senang dengan diadakannya program ini, karena dapat sangat membantu masyarakat yang membutuhkan renovasi rumah yang lebih nyama dan layak” ujarnya.

2.6.2 Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Bandung

Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Bandung adalah berupa uang yang nantinya diberikan kepada para penerima manfaat untuk dibelikan keperluan merenovasi rumah yang rusak atau tidak layak dengan memaksimalkan bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Bandung.

2.6.3 Monitoring Penerima Manfaat

Setiap program bantuan sosial tentunya dilakukan monitoring atau memantau berjalannya program dan memonitor penerima manfaat untuk mengetahui perkembangan para masyarakat yang membutuhkan bantuan renovasi RTLHU yang ada di Kota Bandung. Adapun proses monitoring sebagai berikut:

- Memberikan bantuan kepada masyarakat yang menerima bantuan dana renovasi
- Meminta bukti pembelian bahan bangunan yang digunakan untuk merenovasi rumah
- Memantau berlangsungnya renovasi rumah (petugas dari BAZNAS terjun

langsung memantau perkembangan renovasi rumah

- Setelah selesai, petugas BAZNAS kembali datang ke lokasi renovasi lalu mendokumentasikan rumah yang sudah selesai di renovasi.

Jadi dalam proses memonitoring ini petugas BAZNAS tidak begitu saja melepaskan tanpa memonitoring bantuan yang sedang terlaksana, dari mulai survet hingga rumah selesai di renovasi mereka tetap memantau kegiatan tersebut demi kelancaran renovasi dan sesuai dengan rencana program.